

Analisis Pendapatan Transfer Desa terhadap Belanja Desa

Amrizal Imawan^{1*}, Ira Megasyara², Serly Novelya Vensca³

¹ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Lamongan, 62218, Indonesia

² Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Lamongan, 62218, Indonesia

³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Lamongan, 62218, Indonesia

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of government income transfer on village expenditure in Sidokumpul village, Paciran district, Lamongan. This research includes quantitative research that emphasizes the causality (causal effect) between variables. The analytical method used is descriptive analysis, simple linear regression analysis and correlation analysis. The object of this research is village budget realization report (APBDes) on 2016-2020 from website of Sidokumpul village and documentation owned by the village government. The result of simple regression analysis showed that $Y = -39,805,666,820 + 1,031X$, meaning that there is a relationship between government income transfers on village (variable X) and village expenditure (variable Y). The results of the Pearson correlation analysis obtained a correlation coefficient value of 0.937, meaning that the relationship or correlation between government income transfers on village (variable X) and village expenditure (variable Y) is very strong. The results of the t-test analysis obtained a result of 4,648 and a significance value of $0.019 < 0.05$, it can be concluded that H_0 is rejected and H_a is accepted. Thus, it can be concluded that village transfer income has a significant effect on village expenditure in the village of Sidokumpul, Paciran district, Lamongan.

Keywords: income transfer on village; village expenditure; Village Finances

Article Info

Affiliation:

^{1,2,3} Faculty of Management and Business, Muhammadiyah Lamongan University, Lamongan

*Correspondence:

E-mail address:

amrizal.imawan10@gmail.com

iramegasyara@gmail.com

selynovelya17@gmail.com

Article History:

Received : 2020 - 11 - 12

Reviewed: 2020 - 11 - 19

Revised : 2020 - 11 - 26

Accepted : 2020 - 12 - 15

1. Pendahuluan

Sejak tahun 2001 otonomi daerah telah membuka ruang kepada pemerintah daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi untuk mengurus dan bertanggungjawab atas keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Tujuan otonomi daerah tersebut adalah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah Kabupaten dan Kota ataupun antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan. Sistem sentralisasi pembangunan yang telah berlangsung selama ini mengakibatkan

pembangunan yang tidak merata bahkan menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Menurut data BPS (2015) tingkat kemiskinan diperkotaan mencapai 8,22% sedangkan di pedesaan sebesar 14,09%. Strategi pemerintah dalam menghadapi persoalan terkait ketimpangan pembangunan tersebut dengan memberikan perhatian besar kepada pembangunan perdesaan.

Wujud perhatian pemerintah terhadap pembangunan daerah perdesaan yaitu dengan memberikan hak otonom kepada pemerintah desa untuk mengalih segala potensi kekayaan yang dimiliki. Beberapa undang-undang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk memperkuat kedudukan desa sebagai daerah otonom. Terbaru adalah undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014, UU ini memberikan perubahan besar dan sangat penting dalam memberikan kedudukan dan relasi bagi pemerintahan desa dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang meliputi sistem demokrasi, aspek kewenangan, pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan. Hak otonomi yang diberikan kepada pemerintah desa dalam undang-undang tersebut yaitu desa diberikan hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan rumah tangga dan masyarakatnya berlandaskan hak asal usul, nilai sosial budaya, adat istiadat serta menetapkan dan mengelola keuangan dan kekayaan desa.

Pemerintah desa dalam menjalankan hak-hak tersebut tentu memerlukan dukungan dana. Selama ini pemerintah desa telah memperoleh pendanaan yang bersumber dari pendapatan asli desa (PADes), dana desa yang berasal dari APBN, ADD yang berasal dari dana perimbangan pemerintah Kabupaten/Kota, bagian dari pendapatan retribusi dan pajak daerah Kabupaten/Kota, dana bantuan dari Provinsi/Kabupaten/Kota, sumbangan atau hibah pihak ketiga, dan pendapatan lain-lain yang sah. Dengan pendapatan tersebut diharapkan pemerintah desa mampu memberikan pelayanan terbaik untuk kemajuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa mempunyai hak dan wewenang untuk mengelola keuangan dan segala potensi kekayaan yang dimiliki oleh desa. Pemerintah desa juga diberikan kebebasan untuk mengalih sumber-sumber pendapatan keuangan desa. Namun sampai selama ini pemerintah desa masih bergantung pada pendapatan transfer desa seperti transfer dari pemerintah pusat (dana desa), ADD dari pemerintah Kabupaten/Kota, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Padahal sejak tahun 2015 pemerintah pusat telah memberikan dana desa yang bertujuan untuk menstimulus agar pemerintah desa mampu mengembangkan dan meningkatkan potensi pendapatan asli desa. Sehingga pemerintah desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat tidak lagi bergantung pada dana transfer dari pemerintah di atasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Amnan, Herman dan Hardiani (2019) mengungkapkan bahwa ADD berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja pemerintah desa bahkan menjadi faktor dominan, sedangkan pendapatan asli desa tidak berpengaruh dan negative signifikan terhadap belanja desa. Hal ini karena pendapatan asli desa (PADes) sangat kecil tidak berbanding dengan biaya anggaran belanja desa. Hasil penelitian Dewi dan Ova (2018) tentang pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa dan kemiskinan menyatakan bahwa ADD berpengaruh terhadap belanja pemerintah desa, namun tidak berpengaruh pada

pengentasan kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Pangestu, Purbasari dan Wardana (2018) mengungkapkan bahwa alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap belanja desa karena ADD diperuntukkan untuk membiayai Gajiperangkat desa (kepala desa dan pegawainya)serta operasional desa. Sedangkan program prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa dari alokasi dana desa sangat minim.

Selain dari ADD yang bersumber dari transfer pemerintah, sejak tahun 2015 pemerintah desa telah diberikan dana desa dari APBN yang cukup besar. Hal ini menambah sumber pendapatan keuangan desa yang bersumber dari pendapatan transfer desa. Pendapatan-pendapatan tersebut harus sepenuhnya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan belanja desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Dana desa ditujukan untuk menstimulus atau memberi rangsangan kepada pemerintah desa, sehingga dana desa digunakan membiayai belanja desa yang diprioritaskan untuk pembangunan baik infrastruktur maupun pengalihan potensi ekonomi dan kekayaan desa. Mulyani (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PADes, ADD dan DD berpengaruh terhadap belanja pemerintah desa. Dari uraian diatas dan beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti menganggap penting untuk meneliti dan menganalisis terkait dengan seberapa besar pemerintah desa bergantung pada pendapatan transfer desa dalam memenuhi belanja pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan transfer desa mempengaruhi belanja desa. Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai objek penelitian karena termasuk desa yang memperoleh dana transfer dari pemerintah diatasnya.

2. Kajian Teori Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa keuangan desa merupakan suatu hak dan kewajiban pemerintah desa yang bisa dinilai menggunakan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan semua proses kegiatan pemerintah desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa, adalah uraian dari RPJMDes untuk satu periode yaitu 1 (satu) tahun. Pada tahun 2015 sumber pendapatan keuangan desa semakin banyak dan lebih besar yang berasal dari pemerintah pusat yaitu dana desa. Dengan adanya dana desa keuangan desa lebih kompleks dan harus dikelola secara akuntabel, sehingga pengelolaan keuangan desa harus direncanakan lebih matang dan dimasukkan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Perencanaan pembangunan desa harus diarahkan dan sesuai dengan RPJMDes dan RKPDes yang telah disusun untuk mewujudkan visi misi kemajuan desa.

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau disingkat APBDesa, yaitu perencanaan program atau kegiatan tahunan yang berisi rincian pendapatan desa, pembiayaan desa dan belanja pemerintah desa. Setelah APBDes tersusun selanjutnya

disahkan dengan peraturan desa tentang APBDesa yang disepakati kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.Peraturan pemerintah desa tentang APBDesa selanjutnya dilaporkan kepada Bupati/Walikota lewat Pemerintah Kecamatan untuk mendapat persetujuan.

Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan uang dan menjadi hak desa dalam satu periode anggaran yang diterima melalui rekening kas desa.Pendapatan desa sesuai pasal 72 UU Desa terdiri dari:Pendapatan Asli Desa;Dana Desa yang berasal dari APBN; Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa; Bantuan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; sumbangan dan Hibah dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat; pendapatan Lain-lain Desa yang Sah.Pendapatan-pendapatan tersebut jika dikelompokkan menurut golongannya terdiri dari:Pendapatan Asli Desa (PADesa); Transfer; Pendapatan Lain-Lain.

Pendapatan Transfer Desa

Pendapatan transfer terdiri dari: Dana Desa (DD); Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota.

Dana Desa: Dana Desa (DD) merupakan transfer dana yang berasal dari pemerintah pusat yang telah dianggarkan dalam APBN yang diperuntukkan bagi pemerintah desa yang dikirim melalui kas pemerintah Kabupaten/Kotayang dimaksudkan untuk membiayai pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Pemerintah pusat mulai tahun 2015 telah menganggarkan Dana Desa sertiap tahun secara nasional dalam APBN.Besaran alokasi anggaran dana desa yang peruntukan kepada pemerintah desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Penentuan besarnya Anggaran dari APBN ditentukan berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan mempertimbangkanluas wilayah, angka kemiskinan jumlah penduduk, dan tingkat kesulitan geografis yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

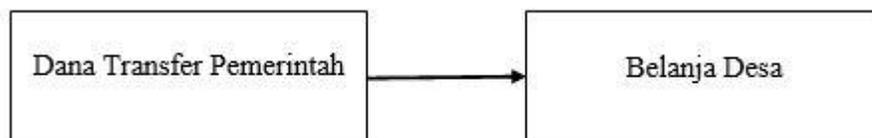
Alokasi Dana Desa: Sesuai dengan amanat Undang-undang pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus menganggarkan ADD dalam APBD Kabupaten/Kota setiap periode anggaran. ADD adalah dana perimbangan yang diperoleh pemerintah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus paling sedikit 10%. Dalam proses penyusunan anggaran desa, Bupati /Walikota memberikan informasi terkait besarnya ADD yang akan diberikan kepada pemerintah desa terhitung jangka waktu 10 hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) sahkan Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi: Bagian hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% dari total realisasi penerimaan pendapatan daerah. Penganggaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan melalui

peraturan Bupati/Walikota dengan ketentuan: 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota: Bantuan keuangan yang bersumber dari pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut bertujuan untuk percepatan pembangunan dan kemajuan desa. Bantuan keuangan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota bersifat umum ataupun khusus. Bantuan yang bersifat umum digunakan dan diperuntukkan sesuai kebutuhan desa penerima bantuan, sedangkan bantuan yang bersifat khusus digunakan dan diperuntukkan sesuai dengan arahan dan perintah dari pemerintah pemberi bantuan.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Penelitian

H₀ : Diduga tidak ada pengaruh secara signifikan dari analisis pendapatan transfer desa terhadap belanja pemerintah desa di desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

H_a : Diduga ada pengaruh secara signifikan dari analisis pendapatan transfer desa terhadap belanja pemerintah desa di desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

3. Metode, Data, dan Analisis

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang menekankan pada hubungan kausalitas (*causaleffect*). Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan memperoleh temuan-temuan yang dapat dicapai dengan menggunakan tahapan-tahapan statistic atau dengan cara kuantifikasi (pengukuran). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menguji hipotesis dan penelitian ini menjelaskan fenomena serta bentuk hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini akan menguji dan menganalisis Pendapatan transfer desa terhadap belanja pemerintah desa.

Objek Penelitian ini yaitu di desa Sidokumpul yang berada di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Objek atau fenomena sesuai dengan kenyataan yang ada serta penelitian ini menggunakan angka-angka dalam laporan keuangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari pendapatan transfer desa dan belanja desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2017 – 2020. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan sifat yang diambil oleh populasi (Sugiyono, 2015). Teknik

pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu teknik penyampelan data dengan menggunakan

No	Tahun	Total Belanja Desa
1	2016	911.192.900
2	2017	1.054.285.400
3	2018	1.024.707.700
4	2019	921.064.400
5	2020	945.926.300

pertimbangan atau kriteria tertentu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data kuantitatif merupakan data yang berupa dalam bentuk angka yang diambil dari laporan keuangan pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahunan desa Sidokumpul dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier sederhana yang diolah dengan program SPSS. Analisis statistic deskriptif bertujuan agar dapat melihat gambaran dari data penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Secara matematis model analisis regresi linier sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

4. Hasil dan Pembahasa

Hasil

Berdasarkan hasil dari analisis pendapatan transfer transfer desa terhadap belanja pemerintah desa di desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dapat dilihat pada data transfer mulai tahun 2016 – 2020. Secara jelas data pendapatan transfer desa dan belanja desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Pendapatan Transfer Desa

No	Tahun	DD	ADD	HP	BK	Total
1	2016	592.836.450	236.370.600	16.046.650	64.689.200	909.942.900
2	2017	755.442.600	236.044.600	22.797.200	40.000.000	1.054.284.400
3	2018	637.644.000	236.004.600	25.019.100	126.000.000	1.024.667.700
4	2019	703.597.000	241.260.300	26.207.100	-	971.064.400
5	2020	684.496.000	236.552.100	24.878.200	-	945.926.300

Untuk mempermudah analisis dan pembahasan angka-angka dari data tersebut yang terlalu besar digitnya perlu disederhanakan terlebih dahulu sehingga lebih mudah dalam melakukan perhitungannya. Penyederhanaan dilakukan dengan dibagi angka 1.000.000, maka hasil dari penyederhanaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Penyebaran Angka

No	Tahun	Pendapatan Transfer	Belanja Desa
1	2016	909	911
2	2017	1.054	1.054
3	2018	1.024	1.024
4	2019	971	921
5	2020	945	945

Statistic deskriptif yang digunakan untuk memberikan deskripsi atau variabel-variabel penelitian secara statistic. Statistic yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (Mean), Maksimal, Minimal dan standar deviasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data *time series* APBDes desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Maka data observasi dan dokumentasi yang diperoleh tersebut merupakan data deskriptif statistic sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Hasil Deskripsi Pendapatan Transfer desa dan Belanja Desa Sidokumpul

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan	5	909942900,00	1054284400,00	981177140,0000	58427960,88606
Belanja	5	911192900,00	1054285400,00	971435340,0000	64263463,72032
Valid N (listwise)	5				

Sumber: Data diolah (SPSS)

Dari hasil analisis data dengan menggunakan statistic deskriptif tersebut dapat dilihat kondisi pendapatan transfer desa dari tabel diatas bahwa rata-rata pendapatan transfer desa sebesar 981.177.140 dengan nilai tertinggi sebesar 1.054.284.400 dan nilai terendah sebesar 909.942.900, serta nilai standar deviasi dari pendapatan transfer desa sebesar 58.427.960,8. Sedangkan belanja desa dari pengolahan statistic deskriptif menjelaskan bahwa nilai terendah selama tahun 2016 sampai 2020 yaitu 911.192.900 dan yang tertinggi sebesar 1.054.285.400. Tingkat standar deviasi sebesar 64.263.463,7 sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 971.435.340.

Uji normalitas dimaksudkan untuk melihat apakah distribusi variabel terikat untuk setiap variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas ini menggunakan teknik test of normality kolmogoriv-smirnovone sampel dan kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan normal atau tidaknya, dengan ketentuan jika probabilitas $\geq 0,05$, maka distribusi tersebut dikatakan normal dan apabila probabilitas $\leq 0,05$, maka distribusi tersebut dikatakan tidak normal. Berikut adalah hasil analisis data dengan menggunakan SPSS.

Tabel 4. Test of Normality Kolmogoriv-Smirnovone

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Pendapatan	Belanja
N		5	5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	981177140,0000	971435340,0000
	Std. Deviation	58427960,88606	64263463,72032
	Most Extreme Differences	Absolute	,172
	Positive	,169	,254
	Negative	-,172	-,196
Test Statistic		,172	,254

Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c, d}	,200 ^{c, d}
-------------------------------	----------------------	----------------------

Sumber: Data diolah (SPSS)

Dari hasil pengolahan data menggunakan uji normalitas dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa data residual terdistribusi dengan normal. Untuk menggambarkan hubungan antara pendapatan transfer desa dengan belanja pemerintah desa maka dilakukan pengujian linier sederhana. Hasil dari pengujian regresi linier sederhana dapat diketahui pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Analisis Regresi Sederhana

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-39805666,820	217874195,702		-,183	,867
	Pendapatan	1,031	,222	,937	4,648	,019

a. Dependent Variable: Belanja

Sumber: Data diolah (SPSS)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana dapat diketahui suatu persamaan regresi seperti berikut.

$$Y = -39.805.666,820 + 1,031X$$

a = -39.805.666,820 (konstanta)

b = 1,031 (pendapatan transfer desa)

Koefisien persamaan regresi linier sederhana diatas dapat diartikan sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan persamaan regresi linier sederhana nilai konstanta sebesar -39.805.666,820 pada persamaan ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen sama dengan 0 (nol), maka variabel belanja desa mengalami kenaikan sebesar -39.805.666,820. Sedangkan koefisien regresi X (pendapatan transfer desa) sebesar 1,031 artinya jika pendapatan transfer desa mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka pendapatan transfer desa terhadap belanja pemerintah desa sebesar 1,301. Satuan dengan asumsi bahwa variabel independen konstan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara pendapatan transfer desa dan belanja desa. untuk mengetahui hubungan antar variabel tersebut digunakan analisis koefisien korelasi pearson. Berikut ini adalah analisis koefisiensi korelasi pearson dengan menggunakan alat bantu perhitungan SPSS.

Tabel 6. Correlations

	Correlations	
	Pendapatan	Belanja
Pendapatan	Pearson Correlation 1	,937*
	Sig. (2-tailed)	,019

	N	5	5
Belanja	Pearson Correlation	,937*	1
	Sig. (2-tailed)	,019	
	N	5	5

Sumber: Data diolah (SPSS)

Dari hasil analisis korelasi pearson dapat dilihat bahwa besarnya nilai koefisien korelasi antara pendapatan transfer desa dengan belanja pemerintah desa sebesar 0,937. Hal ini menunjukkan keeratan hubungan antara pendapatan transfer desa dengan belanja pemerintah desa termasuk kriteria sangat kuat. Arah korelasi searah karena menunjukkan positif, artinya apabila pendapatan transfer desa mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. Besar korelasi $> 0,5$ berarti terjadi korelasi atau hubungan yang kuat antara pendapatan transfer desa dengan belanja pemerintah desa. Sedangkan uji koefisien determinasi diketahui bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0.837 atau sebesar 83,7%. Nilai ini menjelaskan bahwa variabel belanja desa dipengaruhi sebesar 83,7% oleh variabel pendapatan transfer desa, sedangkan sisanya 16,3% dipengaruhi oleh factor lain selain variabel pendapatan transfer desa.

Berdasarkan hasil analisis data yang digunakan dapat dilihat bahwa variabel pendapatan transfer desa (X) memiliki t hitung sebesar 4.648 dan nilai signifikansi sebesar 0,019. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,019 $< 0,05$, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Secara parsial mempunyai keterkaitan atau pengaruh signifikan terhadap besarnya belanja desa. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi atau rendahnya pendapatan transfer desa akan mempengaruhi tinggi rendahnya belanja desa.

Pembahasan

Pengaruh pendapatan transfer desa terhadap belanja pemerintah desa dalam APBDes desa Sidokumpul tahun 2016 sampai 2020 yang dianalisis menggunakan SPSS memperlihatkan bahwa angka koefisien regresi X (pendapatan transfer desa) sebesar 1,031 Artinya bahwa ketika pendapatan transfer desa mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka besarnya belanja desa (Y) akan berakibat terhadap kenaikan sebesar 1,031. Koefisien bernilai positif karena terjadi hubungab antara pendapatan transfer desa dengan besarnya belanja desa.

Variabel pendapatan transfer desa secara parsial dapat diketahui mempunyai t hitung yakni 4.648 dan nilai signifikan 0,019. Keputusan pengambilan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Maka diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.019 $< 0,05$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Secara parsial memilikiketerkaitan atau pengaruh signifikan terhadap besarnya belanja desa. Hal ini berarti semakin tinggi pendapatan transfer desa akan mempengaruhi besar kecilnya belanja desa. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pendapatan transfer desa telah berjalan sesuai dengan tujuan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Sidokumpul masih sangat bergantung kepada dana transfer desa dari pemerintah di atasnya. Hal ini juga menunjukkan belum mandirinya pemerintah desa dalam membiayai pembangunan desa. Sejak tahun 2015 pemerintah desa telah mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat yang telah dianggarkan setiap tahunnya pada APBN (anggaran pendapatan dan belanja Negara) berupa dana desa (DD). Dana desa digelontorkan dengan tujuan memberikan stimulus kepada pemerintah desa untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Dengan berkembangnya potensi sumberdaya terkhusus sumber daya ekonomi diharapkan desa akan semakin mandiri dalam membiayai pembangunan desa. Namun sampai saat ini harapan itu belum menunjukkan keberhasilan atau tercapai. Hal ini karena banyak pemerintah desa yang belum mampu memanfaatkan dana transfer pemerintah tersebut untuk program-program peningkatan potensi atau pengalihan sumber-sumber pendapatan asli desa. Selama ini program yang dijalankan oleh pemerintah kebanyakan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur baik itu jalan desa, jembatan desa dan balai desa. Maka dari itu penetapan prioritas penggunaan dana transfer desa harus diarahkan pada program-program yang berorientasi pada pengalihan potensi sumber-sumber keuangan desa.

4 Simpulan dan Saran

Hasil pengolahan data dengan analisis regresi sederhana diperoleh hasil yaitu $Y = -39.805.666,820 + 1,031X$, dari perhitungan ini menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan transfer desa (variabel X) dengan belanja desa (variabel Y). Hasil analisis korelasi pearson diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,937, artinya hubungan atau korelasi antara pendapatan transfer desa (variabel X) dengan belanja pemerintah desa (variabel Y) berarti sangat kuat. Hasil analisis Uji t hitung diperoleh hasil sebesar 4.648 dan nilai signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan transfer desa berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis memberikan beberapa saran yaitu pertama pendapatan transfer desa merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan di Desa Sidokumpul, oleh karena itu dana tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Kedua pemerintah desa harus berusaha untuk mengalih potensi sumber daya keuangan yang mampu menumpang pembangunan desa. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah desa Sidokumpul tidak terus bergantung pada pendapatan transfer desa.

Referensi

Amnan, A. R., Herman, S. dan hardiani (2019) pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol 1 hal 37-46
Bougie, R. & U. Sekaran (2017), Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-

- Keahlian, Edisi 6, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.
- Dewi, R. S & Ova, N. I (2018) pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa dan kemiskinan. JRAM. Vol 5. No 2
- Ghozali, I (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Universitas Diponegoro
- Mulyani, H. S (2020) Analisis fenomena fly paper effect dalam belanja desa berdasarkan pendapatan asli desa, dana desa dan alokasi dana desa. Jaksi. Vol 1. No 1. Hal 28-46
- Pangestu, Ilham Adhi, Heppy Purbasari dan Bramudya Wisnu Wardana. (2018). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum Dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)*. *The 7th URECOL 2018*. 281-287. ISSN 2407-9189.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.